

UNIFIKASI DIVERSITAS BERBASIS SUBAK ANTARA NYAMA BALI DAN NYAMA SELAM DI DESA TEGALLINGGAH, BULELENG, BALI: DEKONSTRUKSI KONVERGENSI BERBASIS HARMONISASI DALAM PERSPEKTIF POS-STRUKTURALISME

Made Ferry Kurniawan¹, I Gede Suwindia²

Institut Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan^{1,2}

Email: kurniawanmadeferry@gmail.com¹, igedesuwindia76@gmail.com²

Abstrak

Penyebutan nyama Bali dan nyama Selam adalah idiom yang tidak bebas nilai, karena mengarahkan yang sosial ke dalam suatu arena, dengan tujuan mengakumulasi modal akumulatif serta modal otoritatif. Penggunaan istilah emik untuk memperkuat integrasi antar individu, tidak murni untuk mengintegrasikan tiap agen. Penelitian ini mempergunakan pendekatan kualitatif, dalam selingkung studi kasus. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan melakukan observasi, wawancara dan studi dokumen. Metode analisis data terdiri dari beberapa tahap, seperti pengumpulan data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Pemberian status nyama dalam sistem subak di Desa Tegallingga adalah konstruksi pengetahuan untuk menguasai individu lain. Pendekatan pos-strukturalisme melihat bahwa, upaya mengarahkan entitas sosial ke dalam ruang konformitas yang inklusif dan harmoni dengan menyematkan idiom tertentu, dilatarbelakangi suatu kepentingan. Analisis kontemporer dalam melihat nyama sebagai aspek semiotis yang tidak hanya merepresentasikan akumulasi modal sosial, tetapi bertujuan untuk memelihara keberlangsungan sistem ekonomi, sebagai sumber daya akumulatif determinan. Dalam konteks sumber daya otoritatif, ada agen yang bertugas mengatur siklus pembagian air, petani yang ingin menerima air, harus mendapatkan persetujuan dari otoritas subak.

Kata kunci: idiom, nyama, pos-strukturalisme

Abstract

The mention of nyama Bali and nyama Selam is an idiom that is not value-free, as it directs the social aspect into an arena, with the aim of accumulating both cumulative and authoritative capital. The use of the emic term to strengthen integration among individuals is not purely to integrate each agent. This research uses a qualitative approach within the framework of a case study. Data collection techniques were obtained through observation, interviews, and document studies. The data analysis method consists of several stages, such as data collection, data reduction, and conclusion drawing. The granting of the nyama status within the subak system in Tegallingga Village is a construction of knowledge to dominate other individuals. The post-structuralist approach sees that the effort to direct social entities into a space of inclusive and harmonious conformity by embedding certain idioms is backed by an interest. Contemporary analysis views nyama as a semiotic aspect that not only represents the accumulation of social capital but also aims to maintain the sustainability of the economic system, as a determinant accumulative resource. In the context of authoritative resources, there are agents responsible for regulating the water distribution cycle; farmers who wish to receive water must obtain approval from the subak authority.

Keywords: idiom, nyama, post-structuralism.

PENDAHULUAN

Subak adalah konsepsi kehidupan agraris masyarakat Bali yang terimplementasi dalam sistem irigasi hulu-hilir, berasaskan kolektivitas, egalitarianisme, penguatan identitas sosial ke-Bali-an, dan ideologi konservasi ekologis berbasis kultural. Subak adalah representasi "locus hominid socialis", atau keberadaannya dipergunakan sebagai wahana mengaktualisasikan esensi individu sebagai makhluk sosial (Wiguna et al., 2018). Realitasnya, subak selalu diinternalisasi nilai masyarakat Bali dengan corak agama Hindu – suprastruktur mengonstruksi tatanan struktur dan infrastruktur berbasis nilai kultural masyarakat Bali (Angella, 2016; Deranty & Dunstall, 2017; Oh, 2022). Tetapi, sosio-topografis ke-Bali-an sistem subak, berbeda dengan sistem agraris Desa Tegallingga, Buleleng, Bali. Di desa ini, subak tidak didominasi nilai petani Bali yang beragama

Hindu, tetapi secara integralistik mengalami persilangan dengan petani Bali yang beragama Islam. Corak relasi yang menyilang dalam arena heterogenitas, adalah implementasi multikulturalisme. Plaut, Stevens et al., Markus, Rattan dan Ambady (Birnbaum et al., 2021) menyatakan, multikulturalisme mengusung gagasan heterogenitas kelompok sosial dan keinginan integratif sebagai kekuatan utama dalam arus perbedaan, sebagai esensi rekognisi sosial diantara mereka (Honneth & Koch, 2014; Rasmussen, 2010; Syme, 2018).

Afirmasi diversitas petani Bali (identik dengan status ke-Hindu-annya) dan petani Islam sebagai anggota *subak* di Desa Tegallinggah, diperkuat dengan *social idiomatic* yang disebut dengan *nyama*. *Nyama* adalah istilah emik dalam Bahasa Bali yang berarti saudara. Dengan menyebut anggota *subak* yang beragama Islam sebagai *nyama* (selanjutnya disebut *nyama Selam* – *Selam* adalah fonetik masyarakat Bali untuk menyebut saudara atau masyarakat yang beragama Islam), ini berarti antara anggota *subak* yang beragama Islam maupun Hindu terintegrasi ke dalam sistem sosial yang *equilibrium*. *Nyama* menandakan beroperasinya *social capital* diantara dua kelompok petani yang berbeda secara latar belakang agama, tetapi terintegrasi dalam satu sistem pertanian tradisional. Bourdieu dan Wacquant (Portes & Vickstrom, 2011) menyatakan, modal sosial sebagai piranti dalam membentuk “jaring sosial”, karena tiap individu memiliki keadaan inheren dalam ruang relasi interpersonal (Casuso, 2022; Giladi, 2023; Roessler & Mokrosinska, 2013; Tarca, 2018).

Penggunaan istilah emik untuk memperkuat integrasi antar individu, tidak murni untuk mengintegrasikan tiap agen (Evans, 2023; Kautzer, 2014; Schulz, 2022). Secara semiotis, penggunaan istilah tersebut memiliki tendensi mengopresi dan menghegemoni individu atau kelompok sosial lain secara laten (Benzer, 2011; Canivez, 2011; Erman & Moller, 2016; Galeotti, 2015). Penyebutan *nyama* Bali dan *nyama Selam* adalah idiom yang tidak bebas nilai, karena mengarahkan yang sosial ke dalam suatu arena, dengan tujuan mengakumulasi modal akumulatif serta modal otoritatif (loris, 2023; Steele, 2017). Diversitas masyarakat *subak* Desa Tegallinggah, khususnya dalam aspek agama, justru mengalami reduksi dalam penyebutan istilah *nyama*. Dari konteks sosial tersebut, tulisan ini mencoba mempertanyakan, mengapa masyarakat agraris di Desa Tegallinggah menggunakan istilah *nyama* Bali dan *nyama Selam* untuk menyebut anggota *subak*. Urgensi memperlakukan topik tersebut adalah, konsepsi wacana selalu mengandung kehendak kuasa dari para agen yang terintegrasi dalam sistem yang mereka bangun (Sinnerbrink, 2011; Yun, 2014). Dengan kata lain, tulisan ini berusaha menyingkap alasan dibalik penggunaan istilah *nyama*, yang berusaha mengarahkan konteks masyarakat plural ke dalam ruang konvergensi. Artikel ini menggunakan perspektif teori pos-strukturalisme, untuk mendekonstruksi dua fokus masalah, yakni: a) bagaimana perspektif Michel Foucault tentang ilmu pengetahuan yang dipergunakan untuk melihat praktik beroperasinya kuasa dalam nuansa pluralitas masyarakat Desa Tegallinggah sebagai masyarakat agraris harmoni?; b) bagaimana perspektif Pierre Bourdieu dalam melihat *nyama* sebagai aspek membangun *social capital*, akumulasi sumber daya otoritatif dan akumulatif? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sekaligus memberikan eksplanasi mengenai diktum *Nyama Bali* dan *Nyama Selam* dalam kerangka kontemporer, dengan memberikan anasir pada dimensi konstruksi wacana dan operasionalisasi idiom tersebut dalam praktik sosial masyarakat agraris di Desa Tegallinggah.

METODE

Penelitian ini mempergunakan pendekatan kualitatif, dalam selingkung studi kasus. Penelitian studi kasus adalah penelitian yang memiliki tujuan untuk menganalisis data, khususnya pembentukan pandangan baru yang membutuhkan perspektif subjek penelitian dan melakukan dekonstruksi pada data empiris. Penelitian studi kasus membutuhkan fokus dari peneliti didalam menganalisa sebuah konteks (Niebauer et al., 2020; Singh, 2015). Konteks penelitian dalam selingkung ini, berhubungan dengan praktik akademis, budaya akademis dan pekerjaan akademis. Untuk mendapatkan data yang spesifik, maka tahapan dalam penelitian ini dimulai dari penentuan subjek (Chafe, 2023; Su, 2022). Subjek dalam penelitian ini adalah petani di lokasi penelitian, Desa Tegallinggah, Buleleng. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan melakukan observasi, wawancara dan studi dokumen. Observasi bertujuan untuk melakukan pengamatan mengenai proses pembentukan harmoni dan interpretasi mengenai realitas laten yang tidak terdekonstruksi.

Kemudian, wawancara. Wawancara bertujuan untuk mengumpulkan data berkaitan dengan hakikat interseksi sosial petani Hindu dan Islam di *subak* Desa Tegallingsah. Terakhir, studi dokumen bertujuan untuk menganalisis sumber yang dipergunakan untuk menafsirkan aspek interseksi dan konstruksi interpretasi untuk membaca realitas secara lebih kritis. Metode analisis data terdiri dari beberapa tahap. Pertama, pengumpulan data, pada tahapan ini peneliti melakukan proses observasi, wawancara dan studi dokumen yang relevan untuk melihat eksistensi petani di *subak* Desa Tegallingsah. Kedua, reduksi data, pada tahapan ini peneliti melakukan proses seleksi, melakukan pemfokusan serta penyederhanaan data yang didapatkan di lapangan. Data yang didapatkan disesuaikan dengan tema riset. Ketiga, penarikan kesimpulan, pada tahapan ini peneliti menarik pernyataan untuk menjawab pertanyaan “*what*” dan “*how*” terkait realitas sosio-kultural di *subak* Desa Tegallingsah, Buleleng.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Perspektif Michel Foucault tentang Ilmu Pengetahuan yang Dipergunakan Untuk Melihat Praktik Beroperasinya Kuasa dalam Nuansa Pluralitas Masyarakat Desa Tegallingsah Sebagai Masyarakat Agraris Harmoni

Kajian *subak* di Desa Tegallingsah, Buleleng, Bali, pernah dipublikasi dalam artikel yang berjudul, “Konflik dan Integrasi: Manajemen Konflik pada Subak Multikultur (Studi Kasus Subak Tegallingsah, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng), ditulis oleh Ratna Artha Windari dan Ketut Sedana Arta, pada tahun 2012. Kajian ini menjelaskan integrasi masyarakat agraris Desa Tegallingsah dalam sistem *subak*, dan manajemen konflik dalam realitas masyarakat setempat yang beragam. Dijelaskan, realitas integratif petani Desa Tegallingsah merepresentasikan *cross cutting affiliation* atau pola interaksi yang menghubungkan antar unit sosial, menetralsir resistensi dan menciptakan loyalitas sosial (Windari & Arta, 2012).

Pendekatan pos-strukturalisme melihat bahwa, upaya mengarahkan entitas sosial ke dalam ruang konformitas yang inklusif dan harmoni dengan menyematkan idiom tertentu, dilatarbelakangi suatu kepentingan (Govier & Steel, 2021; Portes & Vickstrom, 2011; Schemmel, 2011). Pemberian status *nyama* dalam sistem *subak* di Desa Tegallingsah adalah konstruksi pengetahuan untuk menguasai individu lain. Sebagai catatan, *nyama* adalah istilah dalam Bahasa Bali, secara etimologis berasal dari kata *nyom*. *Nyom* adalah air ketuban yang keluar ketika proses bersalin. Secara sintaksis, *nyom* bertransfigurasi menjadi *nyama*. Terminologinya, istilah tersebut menjelaskan kondisi individu yang dilahirkan dari rahim yang sama, karena memiliki sumber ketuban yang sejenis. Konsep *nyama* tidak hanya bermakna genealogis, tetapi juga bermakna sosiologis. Sebagai konstruksi ilmu pengetahuan, istilah *nyama* berpotensi menciptakan kekuasaan. Michel Foucault (Haryatmoko, 2016) menyatakan, upaya konstruksi loyalitas sosial ataupun menetralsir potensi konflik dalam pemberian status tertentu adalah bentuk operasi pengetahuan. Pengetahuan adalah upaya untuk menciptakan kekuasaan yang menormalisir, direalisasikan serta dilegitimasi oleh pranata sosial-ekonomi (Elbers, 2023; Hopper, 2008). *Nyama* adalah cara menciptakan ideologi pendisiplinan, adanya dorongan mengonstruksi tindakan sesuai kehendak subjek, meminimalisir resistensi agar tidak mengganggu sirkulasi kekuasaan kelompok dominan (Cohen, 2019; Villadsen, 2016). Pendisiplinan dan sirkulasi kekuasaan dilegitimasi oleh *subak* sebagai institusi yang terspesialisasi. Atmadja (Windari & Arta, 2012) menyatakan, masyarakat Islam di Bali mengenal konsepsi dualitas, yang menunjukkan keberadaan mereka pada posisi subordinat, sedangkan orang Bali berada pada posisi ordinat. Masyarakat Islam dalam keanggotaan *subak*, menerima status *nyama Selam* (saudara dari agama Islam), dan mengintegrasikan diri sebagai upaya mendapatkan rasa aman dari kelompok dominan. Sehingga, mereka yang menetap di kawasan Desa Tegallingsah mengafirmasi *nyama Selam* sebagai status sosial baru. Polarisasi kelompok ordinat dan sub ordinat, sengaja diintegrasikan dalam suatu pranata, diciptakan idiom yang seolah-olah akomodatif, akan tetapi opresif dan dominasi dijalankan secara sirkulatif-persuasif (Haryatmoko, 2016). Hegemonisasi pemberian status *nyama* terjewantahkan dalam *awig-awig* (aturan pokok) dan *pararem* (aturan turunan). Kedua aturan tersebut menjadi konsensus sosial antar anggota. Foucault (Haryatmoko, 2016) menyatakan, regulasi adalah bentuk ritus kebenaran, dimana semua pola pikir dan tata perilaku didisiplinkan – terlebih mereka yang menerima aturan tersebut

sudah mengafirmasi eksistensi dirinya sebagai *nyama*. Foucault (Kurniawan, 2020) menjelaskan, sistem sosial memiliki otoritas membentuk yang “normal” dan yang “tidak normal”. Agar dianggap “normal”, tiap individu harus tunduk. *Nyama* sebagai *social idiomatic* adalah piranti kuasa untuk meunifikasi diversitas, meminimalisir probabilitas resistensi – Foucault (Kurniawan, 2020) menyatakan, internalisasi konsep tertentu menunjukkan individu dikendalikan faktor non-material dan psikologi, melalui pemberian identitas sebagai ide ketaatan (Foucault et al., 2017; Lennon & Rogers, 2017; Ojakangas, 2012).

b. Perspektif Pierre Bourdieu dalam Melihat *Nyama* sebagai Aspek Membangun *Social Capital*, Akumulasi Sumber Daya Otoritatif dan Akumulatif

Analisis Pierre Bourdieu dalam melihat *nyama* sebagai aspek semiotis yang tidak hanya merepresentasikan akumulasi modal sosial, tetapi bertujuan untuk memelihara keberlangsungan sistem ekonomi, sebagai sumber daya akumulatif determinan (Bottero & Crossley, 2011; Steinmetz, 2011). Konteks tersebut berkaitan dengan *privilege* sebagai nilai ekonomi dominan dalam modal dimensional Weber (Kurniawan, 2020). Petani (baik yang beragama Islam maupun Hindu) dalam organisasi *subak*, tidak hanya melihat dimensi sosial, akan tetapi ada kepentingan ekonomi sebagai suatu arena untuk mendapatkan nafkah. Jika *subak* dibubarkan atau adanya konflik antar anggota *subak*, maka sistem pembagian air sebagai bagian dari kegiatan irigasi akan terganggu, terganggunya mekanisme pembagian air berpotensi merusak lahan pertanian. Maka, penggunaan istilah *nyama* dipergunakan untuk meminimalisir sentimen sosial, atau bentuk kecurigaan lain. Dengan meminimalisir sentimen sosial, maka keberlangsungan *subak* sebagai pranata ekonomi akan tetap bertahan (Hage, 2013; Lizardo, 2011; Santoro, 2011). Realitas tersebut menunjukkan transisi pola interaksi personal menjadi impersonal. Bourdieu (Haryatmoko, 2016) menyatakan, dari keempat modal yang ada, modal yang paling relevan adalah modal ekonomi. Lebih lanjut, tindakan dan kekuasaan bersifat interdependen (Bourdieu, 2011; Nowicka, 2013; Pini & Previte, 2013). Tindakan melibatkan pendayagunaan suatu “alat” dengan tujuan mencapai suatu hasil, diimplementasikan melalui campur tangan secara langsung dari agen atau aktor. Tindakan tersebut bukanlah spontanitas, tetapi tindakan yang direncanakan (Giddens, 2010). Dalam konteks sumber daya otoritatif, ada agen yang bertugas mengatur siklus pembagian air, petani yang ingin menerima air, harus mendapatkan persetujuan dari otoritas *subak*. Jadi, otoritas yang dipegang oleh individu dipergunakan untuk menguasai pihak lain, melalui piranti kuasa yang dimiliki (Desan, 2013; Hayes, 2020; Purhonen, 2016). Jadi, unifikasi diversitas dengan idiom *nyama* tidak murni untuk membangun “jaring sosial”, idiom tersebut tidak secara jernih merepresentasikan intensitas relasi sosial. Tetapi, heterogenitas seolah-olah diafirmasi karena kepentingan ekonomi dan menunjukkan relasi transaksional (Barrett, 2015; Go, 2013; Holdt, 2013).

KESIMPULAN

Idiom *nyama* Bali dan *nyama Selam* pada sistem *subak* di Desa Tegallinggah, Buleleng, Bali, adalah upaya menciptakan konformitas sosial. Keteraturan, ketataan dan pendisiplinan adalah upaya untuk memelihara keberlangsungan sistem. Relasi dalam sistem tidak senantiasa merepresentasikan relasi intim antar individu, tetapi dimanfaatkan mengakumulasikan modal ekonomi. Penggunaan istilah *nyama* untuk menyebut petani Hindu dan Islam tidak berhenti pada tatanan personalnya saja, akan tetapi menciptakan transisi impersonal. Ketaatan individu pada konsensus dilakukan untuk mendapatkan akses sumber daya akumulatif dan sumber daya otoritatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Angella, M. (2016). Work, Recognition and Subjectivity: Relocating The Connection Between Work and Social Pathologies. *European Journal of Social Theory*, 19(3), 340–354. <https://doi.org/10.1177/1368431015594443>
- Barrett, T. (2015). Storying Bourdieu: Fragments Toward a Bourdieusian Approach to “Life Histories.” *International Journal of Qualitative Methods*, 14(5), 1–10. <https://doi.org/10.1177/1609406915621399>
- Benzer, M. (2011). Social Critique in The Totally Socialized Society. *Philosophy and Social Criticism*, 37(5), 575–603. <https://doi.org/10.1177/0191453710393317>
- Birnbaum, H. J., Stephens, N. M., Townsend, S. S. M., & Hamedani, M. Y. G. (2021). A Diversity Ideology Intervention: Multiculturalism Reduces the Racial Achievement Gap. *Social*

- Psychological and Personality Science*, 12(5), 751–759.
<https://doi.org/10.1177/1948550620938227>
- Bottero, W., & Crossley, N. (2011). Worlds, Fields and Networks: Becker, Bourdieu and the Structures of Social Relations. *Cultural Sociology*, 5(1), 99–119.
<https://doi.org/10.1177/1749975510389726>
- Bourdieu, P. (2011). *The Sociology Of Culture And Cultural Studies A Critique*. Libgen Librarian.
- Canivez, P. (2011). Pathologies of Recognition. *Philosophy and Social Criticism*, 37(8), 851–887.
<https://doi.org/10.1177/0191453711413701>
- Casuso, G. (2022). Social Criticism, Dissonance, and Progress: A Socio-Epistemic Approach. *Philosophy and Social Criticism*, 1–23. <https://doi.org/10.1177/01914537211040571>
- Chafe, R. (2023). Rejecting Choices: The Problematic Origins of Researcher-Defined Paradigms within Qualitative Research. *International Journal of Qualitative Methods*, 22, 1–10.
<https://doi.org/10.1177/16094069231165951>
- Cohen, S. (2019). Discipline and Punish: The Birth of The Prison. *Contemporary Sociology: A Journal of Reviews*, 48(1), 29–31. <https://doi.org/10.1177/0094306118815499a>
- Deranty, J. P., & Dunstall, A. (2017). Doing Justice to The Past: Critical Theory and The Problems of Historicism. *Philosophy and Social Criticism*, 43(8), 812–836.
<https://doi.org/10.1177/0191453716685757>
- Desan, M. H. (2013). Bourdieu, Marx, and Capital: A Critique of the Extension Model. *Sociological Theory*, 31(4), 318–342. <https://doi.org/10.1177/0735275113513265>
- Elbers, B. (2023). A Method for Studying Differences in Segregation Across Time and Space. *Sociological Methods and Research*, 52(1), 5–42. <https://doi.org/10.1177/0049124121986204>
- Erman, E., & Moller, N. (2016). What Distinguishes The Practice-Dependent Approach to Justice? *Philosophy and Social Criticism*, 42(1), 3–23. <https://doi.org/10.1177/0191453715580475>
- Evans, J. (2023). On The Very Idea of Normative Foundations in Critical Social Theory. *Philosophy and Social Criticism*, 49(4), 385–408. <https://doi.org/10.1177/01914537211059512>
- Foucault, M., Simon, J., & Elden, S. (2017). Danger, Crime and Rights: A Conversation Between Michel Foucault and Jonathan Simon. *Theory, Culture & Society*, 34(1), 3–27.
<https://doi.org/10.1177/0263276416640070>
- Galeotti, A. E. (2015). The Range of Toleration: From Toleration as Recognition Back to Disrespectful Tolerance. *Philosophy and Social Criticism*, 41(2), 93–110.
<https://doi.org/10.1177/0191453714559424>
- Giddens, A. (2010). *Metode Sosiologi: Kaidah-Kaidah Baru* (E. Adinugraha (ed.); I). Pustaka Pelajar.
- Giladi, P. (2023). Does Contemporary Recognition Theory Rest on a Mistake? *Philosophy and Social Criticism*, 1–25. <https://doi.org/10.1177/01914537231170905>
- Go, J. (2013). Decolonizing Bourdieu: Colonial and Postcolonial Theory in Pierre Bourdieu's Early Work. *Sociological Theory*, 31(1), 49–74. <https://doi.org/10.1177/0735275113477082>
- Govier, E., & Steel, L. (2021). Beyond the 'Thingification' of Worlds: Archaeology and the New Materialisms. *Journal of Material Culture*, 26(3), 298–317.
<https://doi.org/10.1177/13591835211025559>
- Hage, G. (2013). Eavesdropping on Bourdieu's Philosophers. *Thesis Eleven*, 114(1), 76–93.
<https://doi.org/10.1177/0725513612463036>
- Haryatmoko. (2016). *Membongkar Rezim Kepastian: Pemikiran Kritis Post-Strukturalis* (Widiantoro (ed.); IX). Kanisius.
- Hayes, A. S. (2020). The Behavioral Economics of Pierre Bourdieu. *Sociological Theory*, 38(1), 16–35. <https://doi.org/10.1177/0735275120902170>
- Holdt, K. von. (2013). The Violence of Order, Orders of Violence: Between Fanon and Bourdieu. *Current Sociology*, 61(2), 112–131. <https://doi.org/10.1177/0011392112456492>
- Honneth, A., & Koch, F. (2014). The Normativity of Ethical Life. *Philosophy and Social Criticism*, 40(8), 817–826. <https://doi.org/10.1177/0191453714541538>
- Hopper, P. (2008). Understanding Cultural Globalization. *The Sociological Review*, 12(2), 164–166.
[https://doi.org/10.1016/s0315-5463\(83\)72041-9](https://doi.org/10.1016/s0315-5463(83)72041-9)
- Ioris, A. A. R. (2023). World Out of Difference: Relations and Consequences. *Philosophy and Social Criticism*, 49(10), 1220–1243. <https://doi.org/10.1177/01914537221101316>
- Kautzer, C. (2014). Self-Defensive Subjectivity: The Diagnosis of a Social Pathology. *Philosophy &*

- Social Criticism*, 40(8), 743–756. <https://doi.org/10.1177/0191453714541585>
- Kurniawan, K. N. (2020). *Kisah Sosiologi (Pemikiran yang Mengubah Dunia dan Relasi Manusia)* (1). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Lennon, M., & Rogers, L. F. (2017). Morality, Power and The Planning Subject. *Planning Theory*, 16(4), 364–383. <https://doi.org/10.1177/1473095216648185>
- Lizardo, O. (2011). Pierre Bourdieu as a Post-cultural Theorist. *Cultural Sociology*, 5(1), 25–44. <https://doi.org/10.1177/1749975510389714>
- Niebauer, A., Traore, A., Turowetz, J., & Chiles, R. M. (2020). The Epistemological and Methodological Foundations of Qualitative Research. *ISA E-Symposium for Sociology*, 1, 1–13. <https://doi.org/https://www.researchgate.net/publication/339750453>
- Nowicka, M. (2013). Positioning Strategies of Polish Entrepreneurs in Germany: Transnationalizing Bourdieu's Notion of Capital. *International Sociology*, 28(1), 29–47. <https://doi.org/10.1177/0268580912468919>
- Oh, K. (2022). Critiquing Racist Ideology as Harmful Social Norms. *Philosophy and Social Criticism*, 1–24. <https://doi.org/10.1177/01914537221131499>
- Ojakangas, M. (2012). Michel Foucault and The Enigmatic Origins of Bio-Politics and Governmentality. *History of the Human Sciences*, 25(1), 1–14. <https://doi.org/10.1177/0952695111426654>
- Pini, B., & Previte, J. (2013). Bourdieu, the Boom and Cashed-up Bogans. *Journal of Sociology*, 49(2–3), 256–271. <https://doi.org/10.1177/1440783313481742>
- Portes, A., & Vickstrom, E. (2011). Diversity, Social Capital, and Cohesion. *Annual Review of Sociology*, 37, 461–479. <https://doi.org/10.1146/annurev-soc-081309-150022>
- Purhonen, S. (2016). Generations on Paper: Bourdieu and the Critique of 'Generationalism.' *Social Science Information*, 55(1), 94–114. <https://doi.org/10.1177/0539018415608967>
- Rasmussen, D. M. (2010). Conflicted Modernity: Toleration as a Principle of Justice. *Philosophy & Social Criticism*, 36(3–4), 339–352. <https://doi.org/10.1177/0191453709358843>
- Roessler, B., & Mokrosinska, D. (2013). Privacy and Social Interaction. *Philosophy and Social Criticism*, 39(8), 771–791. <https://doi.org/10.1177/0191453713494968>
- Santoro, M. (2011). From Bourdieu to Cultural Sociology. *Cultural Sociology*, 5(1), 3–23. <https://doi.org/10.1177/1749975510397861>
- Schemmel, C. (2011). Distributive and Relational Equality. *Politics, Philosophy & Economics*, 11(2), 123–148. <https://doi.org/10.1177/1470594X11416774>
- Schulz, J. (2022). "Vergangenheitsbewältigung" Revisited: Distinguishing Two Paradigms of Working Through The Past. *Philosophy and Social Criticism*, 1–25. <https://doi.org/10.1177/01914537221117562>
- Singh, K. D. (2015). Creating Your Own Qualitative Research Approach: Selecting, Integrating and Operationalizing Philosophy, Methodology and Methods. *Vision*, 19(2), 132–146. <https://doi.org/10.1177/0972262915575657>
- Sinnerbrink, R. (2011). The Future of Critical Theory? Kompridis on World-Disclosing Critique. *Philosophy and Social Criticism*, 37(9), 1053–1061. <https://doi.org/10.1177/0191453711416088>
- Steele, M. (2017). Social Imaginaries and The Theory of The Normative Utterance. *Philosophy and Social Criticism*, 43(10), 1045–1071. <https://doi.org/10.1177/0191453717715294>
- Steinmetz, G. (2011). Bourdieu, Historicity, and Historical Sociology. *Cultural Sociology*, 5(1), 45–66. <https://doi.org/10.1177/1749975510389912>
- Su, C. (2022). A Research Note: Using Ethics Memoranda of Understanding in Community-Based Research. *Methodological Innovations*, 15(2), 178–190. <https://doi.org/10.1177/20597991221101564>
- Syme, T. (2018). The Pervasive Structure of Society. *Philosophy and Social Criticism*, 44(8), 888–924. <https://doi.org/10.1177/0191453717730874>
- Tarca, L. V. (2018). The Right to be Right: Recognizing The Reasons of Those Who Are Wrong. *Philosophy and Social Criticism*, 44(4), 412–425. <https://doi.org/10.1177/0191453718759161>
- Villadsen, K. (2016). Michel Foucault and The Forces of Civil Society. *Theory, Culture & Society*, 33(3), 3–26. <https://doi.org/10.1177/0263276415581895>
- Wiguna, I. W. A. A., Inggriati, N. W. T., Suda, I. K., Yuliana, E. D., & Kastawan, I. W. (2018). *Jasa*

Lingkungan Budaya Sistem Subak di Bali (I. B. Suryawan (ed.); I). UNHI Press.

Windari, R. A., & Arta, K. S. (2012). Konflik Dan Integrasi: Manajemen Konflik Pada Subak Multikultur (Studi Kasus Subak Tegallinggah, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 78–90. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v1i2.4498>

Yun, T. (2014). Freedom, Legalism and Subject Formation: The Question of Internalization. *Philosophy and Social Criticism*, 40(2), 171–190. <https://doi.org/10.1177/0191453713518322>